

TIM NASIONAL
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KETUA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL KETUA I MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
WAKIL KETUA II MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

ANGGOTA

TIM PEMBIAYAAN

KETUA MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL KEPALA BAPPENAS

SEKRETARIS EKSEKUTIF
DEPUTI SESWAPRES
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kelompok Kerja Pengendali
Program Penanggulangan Kemiskinan
berbasis Keluarga

Deputi Sekretaris Wakil Presiden
Bidang Kesejahteraan Rakyat dan
Penanggulangan Kemiskinan

Kelompok Kerja Pengendali
Program Penanggulangan Kemiskinan
berbasis Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM Mandiri)

Deputi Menko Kesra
Bidang Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kelompok Kerja Pengendali
Program Penanggulangan Kemiskinan
berbasis Pemberdayaan
Usaha Mikro dan Kecil

Deputi Menko Perekonomian
Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan
Keuangan



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

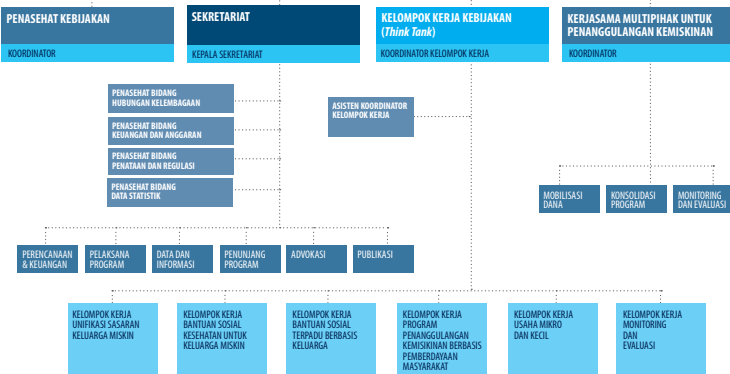
TNP2K adalah singkatan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. TNP2K dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

TNP2K bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dan diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SEKRETARIAT TIM NASIONAL
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SEKRETARIS EKSEKUTIF:
DEPUTI SEKRETARIS WAKIL PRESIDEN
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN



TUGAS TNP2K

- Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga.
- Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

SEKRETARIAT
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110

Telpon : (021) 3912812 -
Faks : (021) 3912-511 , 391-2513
E-Mail : sekretariat@tnp2k.go.id
Website : www.wapresri.go.id

Apa Itu Penanggulangan Kemiskinan?

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui empat strategi dasar:

- 1 Menyempurnakan Program Perlindungan Sosial**
 Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi guncangan-guncangan (*shocks*) seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami guncangan tidak sampai jatuh miskin.
- 2 Peningkatan Akses Masyarakat Miskin Terhadap Pelayanan Dasar**
 Memperbaiki akses masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi beban mereka sekaligus memacu investasi modal manusia (*human capital*).
- 3 Pemberdayaan Masyarakat**
 Upaya untuk memberdayakan orang miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan agar orang miskin dapat keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.
- 4 Pembangunan yang Inklusif**
 Pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan.



Instrumen Utama Penanggulangan Kemiskinan

KLASTER

1

BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA

TUJUAN

Mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses terhadap kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.

KLASTER

2

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TUJUAN

Mengembangkan potensi & memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yg didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat.

KLASTER

3

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL

TUJUAN

Memberikan akses & penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.



KLASTER

4

1. Program Rumah Sangat Murah.
2. Program Kendaraan Angkutan Umum Murah.
3. Program Air Bersih Untuk Rakyat.
4. Program Listrik Murah dan Hemat.
5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan.
6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan.

(Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan Dan Perluasan Program Pro-Rakyat)

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. TKPK bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan serta mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sesuai dengan kebijakan tim nasional.

Susunan Keanggotaan TNP2K

- | | |
|--------------------------------|--|
| A. KETUA | Wakil Presiden Republik Indonesia |
| B. WAKIL KETUA I | Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat |
| C. WAKIL KETUA II | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian |
| D. SEKRETARIS EKSEKUTIF | Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan |
| E. ANGGOTA: | |
| 1 | Menteri Dalam Negeri |
| 2 | Menteri Keuangan |
| 3 | Menteri Sosial |
| 4 | Menteri Kesehatan |
| 5 | Menteri Pendidikan Nasional |
| 6 | Menteri Pekerjaan Umum |
| 7 | Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| 8 | Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal |
| 9 | Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
| 10 | Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan |
| 11 | Sekretaris Kabinet |
| 12 | Kepala Badan Pusat Statistik |
| 13 | Unsur masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh Ketua TNP2K |

Peran Strategis TKPK Daerah

TKPK memiliki peran strategis di daerah untuk mendorong proses perencanaan dan penganggaran yang dapat mendukung efektivitas penanggulangan kemiskinan sehingga program dan kegiatan dapat berpihak pada tujuan penanggulangan kemiskinan.

Untuk mewujudkan peran tersebut, sebagai mitra kerja TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota, TNP2K berkomitmen untuk memperkuat kapasitas kelembagaan TKPK melalui fasilitasi pelatihan dan magang analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan.